

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK
(ADOPSI) SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI YAYASAN
PEMELIHARA ANAK DAN BAYI (YPAB) SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FATMA WAHYU PUSPITASARI

C100130263

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK
(ADOPSI) SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI YAYASAN
PEMELIHARA ANAK DAN BAYI (YPAB) SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FATMA WAHYU PUSPITASARI

C100130263

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK
(ADOPSI) SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI YAYASAN
PEMELIHARA ANAK DAN BAYI (YPAB) SURAKARTA**

OLEH

FATMA WAHYU PUSPITASARI

C100130263

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 02 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Kuswardani, S. H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Bambang Sukoco, S. H., M.Hum

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 Desember 2020

Penulis



FATMA WAHYU PUSPITASARI

C100130263

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI YAYASAN PEMELIHARA ANAK DAN BAYI (YPAB) SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, serta untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut setelah diangkat. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta . Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak ada 7 tahap dan proses pengangkatan anak di Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta telah sesuai dengan peraturan menteri social nomor 110?huk/2009. Akibat Yang Ditimbul Setelah Adanya Proses Pengangkatan Anak Terhadap Anak Yang Di Angkat adalah akibat hukum dalam hal pewarisan dan perwalian. Kurangnya perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak angkat.

Kata kunci: pengangkatan anak, anak angkat, yayasan dan akibat hukum

Abstract

This study aims to determine the implementation process of adoption of children at the Yayasan Babysitting and Baby Care (YPAB) Permata Hati Surakarta, as well as to determine the legal consequences and legal protection for the child after being appointed. The method of approach that the author uses is sociological or empirical legal research. This type of research used by the author in this study is to use a descriptive research type. The location of the study was Yayasan Child and Infant Care (YPAB) Permata Hati Surakarta. Data collection methods in this study used literature study and field study techniques. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation process of adoption of children there are 7 stages and the process of binding children in Yayasan Child and Infant Care (YPAB) Permata Hati Surakarta is in accordance with social ministerial regulation number 110? Huk / 2009. The consequences arising after the adoption process of the child of adopted children is a legal consequence of inheritance and guardianship. Lack of legal protection in Indonesia for adopted children.

Keywords: adoption of children, adopted children, foundations and legal consequences

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi juga merupakan naluri setiap pasangan suami dan istri. Sebab dengan adanya seorang anak maka lengkap sudah kebahagiaan pasangan suami istri tersebut. Akan tetapi terkadang hal itu terbentur dengan kehendak Allah SWT yang belum mengizinkan mereka untuk memiliki anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak di anggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu orang tua berkewajiban untuk merawat, menjaga, mendidik serta membesarkannya hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta kelak mampu berganti membalas budi kepada kedua orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tua beranjak pada usia lanjut (Kamil dan Fauzan. 2008).

Di Indonesia sendiri banyak kasus pembuangan dan penelantaran bayi dan anak. Mereka dengan tega membuang darah daging mereka tanpa rasa kasian. Padahal banyak orang tua diluar sana yang belum memiliki keturunan dan berharap memilikinya. Mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh keturunan baik itu dilakukan dengan jalan medis maupun pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

Di Surakarta sendiri terdapat lembaga pengasuhan anak yang mendapatkan izin untuk melaksanakan pengangkatan anak diantaranya adalah Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. Awal berdirinya yayasan ini berawal dari keprihatinan dan kepedulian ibu-ibu terhadap kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak. Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Surakarta dengan Akte Pendirian No. 25 oleh Notaries R.Soegondo Notodisurya dengan ketua Ibu Dak Imah Hadi Suharto. Persyaratan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta mengacu pada peraturan menteri social Nomor 110/Huk/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

Dikalangan masyarakat jawa sendiri hal ini disebut sebagai pancingan agar memperoleh anak. Namun lepas dari itu semua pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam agama Islam memelihara anak yatim, anak terlantar, anak yang tidak mampu, miskin merupakan tanggungjawab setiap muslim. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan serta melanggar larang yang ada dalam ajaran Islam. Larangan dalam pengangkatan anak tersebut adalah tidak boleh memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009. Sehingga status anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung yang dapat mewarisi berdasarkan kedudukannya. Hal ini terjadi karena didalam islam hukum kewarisan bagi anak angkat tidak berlaku.

Proses pengangkatan anak pada Yayasan Pemlihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakata mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009. Setelah proses pengangkatan anak tersebut maka akan timbul akibat hukum. Salah satu akibat hukum dengan adanya keberadaan anak angkat dalam keluarga adalah timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat. Akibat hukum yang lain yaitu dalam hal pewarisan dan perwalian anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Selain itu terdapat masalah lain dalam pengangkatan anak yaitu persoalan tentang perlindungan terhadap anak angkat dalam kehidupannya di keluarga yang baru nantinya.

Dari uraian tersebut di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh calon orang

tua angkat pada Yayasan Pemeliharaan Anak Dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, mengetahui akibat hukum setelah adanya perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap anak yang telah diangkat serta mengetahui perlindungan anak setelah adanya perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap anak yang telah diangkat.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum sosiologis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soekanto, 1988). Sehingga di ketahui dan diperoleh kejelasan mengenai proses pengangkatan anak dan akibat hukum serta perlindungan hukum dengan adanya perbuatan hukum pengangkatan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan dengan benar agar kepentingan dan keberadaan anak angkat itu sendiri dapat di akui oleh hukum serta masyarakat luas. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 2, Bahwa :

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Prosedur pengangkatan anak dinilai sangatlah penting, sebab jika dikemudian hari terdapat masalah maka terdapat bukti hukum yang sah. Pada penelitian ini akan membahas bagaimana prosedur pengangkatan anak di Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta. Berikut tahapan-tahapan yang harus ditempuh: (1) Tahapan pemberkasan disini orang tua angkat anak(COTA) yang hendak melakukan pengangkatan anak datang langsung ke yayasan. Kemudian berkonsultasi dengan pengurus yayasan. Disini pengurus yayasan akan

memberitahu apa saja persyaratan pengangkatan anak dan mewawancarai calon orang tua angkat anak (COTA). Setelah persyaratan di penuhi oleh COTA maka pemohon resmi di anggap sebagaipemohon pengangkatan anak. (2) Tahapan kunjungan 1 (home visit 1) pada tahapan ini pihak yayasan dan petugas dinas social tenaga kerja dan transmigrasi Surakarta akan berkunjung ke ruma COTA. Apabila dalam kunjungan tersebut memenuhi persyaratan maka akan di keluarkannya surat keterangan pengasuhan.(3) Tahapan kunjungan 2 pada kunjungan ini di lihat bagaimana perkembangan anak selama dalam masa pengasuhan COTA apabila kondisi anak baik maka akan di keluarkannya laporan social pengembangan anak, setelah itu dilakukan tahapan sidang oleh tim PIPA(pertimbangan ijin pengangkatan anak).(4) Tahapan sidang tim PIPA(pertimbangan ijin pengangkatan anak) tim PIPA melakukan sidang untuk menentukan proses pengakatan anak di setujui atau tidak dan menilai kelayakan dari COTA. Kemudian apabila disetujui maka akan keluar surat keputusan pengangkatan anak. (5) Tahapan penetapan pengadilan, setelah itu surat akan di lanjutkan ke pengadilan guna mendapat kepastian hukum.(6) tahapan pencatatan kelahiranpengangkatan anak, Setelah pengadilan mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut maka Calon Orang Tua Anak Angkat harus melapor dan menyampaikan salinan dari pengadilan ke Instansi Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

3.2 Akibat Yang Ditimbul Setelah Adanya Proses Pengangkatan Anak Terhadap Anak Yang Di Angkat

Terdapat 2 akibat hukum yang timbul diantaranya, (1) Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Pewarisan. Menurut hukum Islam hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang di perluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab Di Indonesia pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 4. Sehingga akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak pada Yayasan Pemeliharaan Anak Dan bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta adalah anak angkat tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang

tua angkat, akan tetapi anak angkat di perbolehkan menerima hibah dari orang tua angkatnya, hubungan nasab tidak akan pernah bisa di hapus dan tidak pula bisa di putuskan, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya dan anak angkat hanya memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Pemelihara Anak Dan bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta telah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali dalam hal mensejahterakan anak angkat tersebut. (2) Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Perwalian Ibu Rahning Untari Nugroho dalam wawancara yang dilakukan penulis menyebutkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak angkat dalam hal pewarisan hanya diperuntukan bagi anak angkat yang berjenis kelamin perempuan, bahwa wali nikah anak angkat tetaplah orang tua kandungnya dan orang tua angkat tidak dapat menjadi wali nikah dari anak angkat perempuannya. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya hal ini telah sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam perihal wali nikah untuk anak angkat perempuan

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dengan Adanya Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak khususnya anak angkat. Kurangnya pengawasan serta perlindungan hukum terhadap anak angkat proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada penetapan dari pengadilan. Padahal penetapan pengandilan terhadap anak angkat merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh calon orang tua angkat. penetapan pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat guna menjamin kehidupan anak tersebut hingga dia dewasa nanti. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penganiayaan, pelecehan serta pembunuhan terhadap anak yang di angkat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Proses pengangkatan anak pada yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009. Terdapat 7 tahapan pengangkatan anak yang terdapat di Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, tahapan-tahapan tersebut antara lain : (1)COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA.(2)Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA.(3)Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara.(4)Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara.(5)COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup.(6)Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA.(7)Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi.(8)Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan.(9)Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.(10)Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota.(11)Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Kedua, akibat hukum setelah adanya perbuatan hukum pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak angkat terdapat 2 akibat hukum di yayasan pemelihara

anak dan bayi permata hati Surakarta yaitu, akibat hukum pengangkatan anak terhadap pewarisan akibat hukum perwalian.

Ketiga, Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak khususnya anak angkat. Kurangnya pengawasan serta perlindungan hukum terhadap anak angkat proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan

4.2 Saran

Pertama, bagi masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak hendaknya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia agar terdapat perlindungan terhadap anak angkat tersebut dan jaminan secara hukum terhadap masa depan anak angkat. Sebab dalam pengangkatan anak itu sendiri bertujuan untuk kepentingan anak angkat.

Kedua, bagi pemerintah dalam hal ini hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap anak angkat yang telah di angkat guna terjaminan kehidupan anak angkat tersebut, bila perlu di bentuknya badan pengawasan terhadap anak angkat agar tidak terulang kembali kasus pembunuhan serta penganiayaan anak angkat di Indonesia

Ketiga, bagi pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi tentang proses pengangkatan anak agar masyarakat lebih mengerti akan pentingnya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, bagi pemerintah hendaknya melakukan upaya untuk mengatasi kerusakan moral masyarakat yang mengakibatkan terjadinya penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono. (1988). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak